

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT DI KABUPATEN BIMA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**HERIYANTO
10543005414**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Heriyanto** NIM 10543005414 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 096 Tahun 1440-H/2019 M pada tanggal 22 Sya'wal 1440 H/25 Juni 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019.

24 Sya'wal 1440 H

Makassar,

27 Juni 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abul Rahmani Rahim, S.P., M.Pd., M.H.

2. Ketua : Erywin Akib, M.Pd., Ph.D.

3. Sekretaris : Hafid Nur Hafid, M.Pd.

4. Penguji :
1. Nuzulita Ghinaiya, M.Pd.
2. Dr. Nur Hafid, M.Pd.

3. Purnati, S.Pd., M.Pd.

4. Auliya Andika Rukman, S.H., M.H.

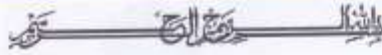
Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erywin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Partai Politik Dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kabupaten Bima

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Heriyanto
Stambuk : 10543005414
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan dipertimbangkan, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan.

Makassar, 27 Juni 2019

Ditetapkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Andi Baso, M.Pd.

Aunah Andika Pakman, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Alib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 954

Die Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heriyanto

NIM : 10543 0054 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Peran Partai Politik dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat di kabupaten Bima

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan

Heriyanto

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heriyanto

NIM : 10543 0054 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Juni 2019

Yang Membuat Perjanjian

Heriyanto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah padamu bukan hanya berkah, tapi tanggung jawab”.



ABSTRAK

Heriyanto. 2014. *Peran Partai Politik Dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kabupaten Bima.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 H. Andi Baso dan Pembimbing 2 Auliah Andika Rukman.

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran partai politik partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik di Kabupaten Bima.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana proses pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data tertulis, melakukan observasi lokasi secara langsung sehingga dalam hal ini penulis berupaya melakukan penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi yang sebenarnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima masih rendah, dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap kontestasi politik. Tidak maksimalnya peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat karena beberapa faktor penghambat, diantaranya tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik, yang sering dipandang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu ketimbang kepentingan masyarakat umum.

Kata Kunci: Peran Partai Politik, Kesadaran Politik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur terhadap Allah SWT karena berkat hidayat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “**Peran Partai Politik Dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat di Kabupaten Bima**”

Yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda **Kasim Sulaiman** dan Ibunda tercinta **Safiah Kasim**. Beserta keluarga tercinta yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. **Bapak Erwin Akib, M.Pd., Ph.D** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Bapak Dr. Muhajir, M.Pd** sebagai ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Drs. H. Andi Baso, M.Pd.I** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Bapak **Auliah Andika Rukman, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2014.
7. Para pemantik penyelesaian studiku tercinta seluruh keluarga Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar Mahasiswa Sanggar yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Definisi Variabel.....	7
B. Penelitian yang Relevan.....	27
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31

E. Prosedur Penelitian	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Instrumen Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai. Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternative pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa system pemerintahan ditangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan (Bijah Subianto, 2000: 20).

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik tercantum bahwa “Partai Politik adalah ¹ _anisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum”.

Banyak orang beranggapan bahwa politik itu kotor. Tetapi sesungguhnya politik adalah sebuah cara dan strategi untuk mencapai tujuan. Sepanjang tujuan yang ingin dicapai adalah baik dan dengan cara yang baik pula, maka tidak akan ada alasan untuk alergi dan menganggap politik itu kotor. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realisasinya, banyak cara-cara kotor yang dilakukan oleh oknum-oknum politikus dan dengan tujuan yang kurang atau sama sekali tidak berpihak pada rakyat (Artiskaligis, 2016).

Hal itu akan membuat masyarakat enggan untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, dan pada akhirnya membuat kesadaran masyarakat akan politik menjadi menurun dan bahkan hilang.

Kesadaran politik adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi politik warga masyarakat, terutama di Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi. Tanpa kesadaran politik masyarakatnya mustahil akan tercipta partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti dan mengambil peran dalam kegiatan politik dinegeri. Kurangnya kesadaran politik masyarakat dikarenakan berbagai hal, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan politik itu sendiri, apalagi didaerah-daerah pedesaan yang masih terjangkiti budaya politik parokial. Tentunya ini menjadi kekhawatiran yang serius bagi kita mengingat kedaulatan tertinggi di Negara kita ada ditangan rakyat. Tanpa kesadaran politik masyarakat tentu roda pemerintahan akan berjalan secara inkonstitusional, dan berindikasi pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan kepentingan rakyat. Dan itu menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab dari partai-paratai politik yang ada dinegeri ini.

Di zaman modern ini partai politik kehilangan peran dan fungsinya. Seperti yang kita tahu saat ini partai-partai politik saling bergulat untuk meningkatkan eksistensinya di Indonesia. Banyak bermunculan partai-partai baru yang saling menonjolkan ideologi mereka masing-masing. Kemajemukan ini sebenarnya bisa menjadikan partai politik sebagai wahana yang beranekaragam sebagai tempat untuk menaungkan aspirasi-aspirasi rakyat. Namun pada kenyataannya persaingan yang tidak sehat ini menimbulkan kecenderungan partai politik saling berupaya menonjolkan kekuatan yang ada pada masing-masing partai politik. Partai politik tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pendidikan politik yang pada dasarnya diperlukan masyarakat awam, yang bisa digunakan dalam menentukan pilihan atau dalam melaksanakan peran sebagai warga negara yang baik, yaitu ikutan di dalam dan turun serta sebagai perwujudan partisipasi politik.

Akibat ketidaksempurnaan peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat menyebabkan berbagai fenomena terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik.

Di kabupaten Bima kesadaran akan politik dianggap sebagai suatu yang tabu, khususnya dimasyarakat pedesaan mereka menganggap bahwa politik bukanlah suatu hal yang penting dan tidak terlalu memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah urusan dan tanggung jawab pemerintah, mereka lebih memilih untuk sibuk dengan urusan kehidupannya masing-masing. Hal itu mereka lakukan karena disetiap kegiatan politik khususnya pemilu mereka merasa setiap pemimpin dan pemerintahan yang menjabat tidak begitu memberikan pengaruh yang berarti untuk permasalahan hidup yang mereka alami. Misalnya masalah-masalah pendidikan dan ekonomi, mereka berpendapat bahwa siapapun pemerintah yang

menjabat taraf hidup mereka tetap biasa saja, menjadi petani dan buruh yang terlilit hutang seperti sebelum-sebelumnya. Hal demikianlah yang membuat mereka enggan untuk berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan-kegiatan politik di daerahnya.

Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima tercatat 75,11 % dari total daftar pemilih pada pemilu legislatif 2014. Sementara pada pemilu presiden 2014, jumlah partisipasi semakin turun menjadi 71,31%. Sedangkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 hanya sebesar 69,14 % (Kompas.com, 2014. Diakses 24 Mei 2018).

Dengan berkurangnya partisipasi politik masyarakat menandakan kurangnya kesadaran masyarakat akan politik itu sendiri, hal itu tentunya bermuara pada lemahnya peran partai politik dalam memaksimalkan fungsinya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman politik dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima?
2. Apa hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten bima?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima.

2. Mengetahui hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dapat dijadikan inspirasi guna melakukan penelitian pada masalah yang serupa yang lebih mendalam.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perbendaharaan pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi para politikus untuk memperbaiki kinerjanya di tengah-tengah masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Variabel

1. Definisi Partai politik

Secara umum Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo,

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil.

Sigmund Neuman menyebutkan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (Mariam Budiardjo, 2008)

Sedangkan menurut UU Nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 mengatakan: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan diatas dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa dengan landasan kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan. Selanjutnya organisasi tersebut digunakan untuk menciptakan masyarakat yang cita-

citakan melalui cara-cara yang sah yaitu dengan mendapatkan kekuasaan dibidang politik. Dengan dimilikinya kekuasaan tersebut maka mereka akan lebih mudah untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan: Tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang. b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. d). mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.1. Fungsi Partai Politik

Ada tujuh Fungsi partai politik (Ramlan Surbakti: 116);

2.1.1 Sosialisasi politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif, mengutamakan konsensus dibanding menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan

konflik, mempunyai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi (kedewasaan demokrasi).

2.1.2 Rekrutmen politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Dalam alam demokrasi walaupun individu disini diberikan kesempatan sama untuk mencapai derajat tertentu untuk mendapatkan suatu hal, tetapi ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginnya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.

2.1.3 Partisipasi politik

Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang. Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari

pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan kepemimpinan pemerintah.

2.1.4 Pemandu kepentingan

Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acapkali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.

2.1.5 Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Banyak rezim di dunia ini yang

tidak dapat mempertahankan kekuasaannya yang dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dari situ muncul ketidakpuasan masyarakat kepada penguasanya yang kemudian berujung pada proses penggantian penguasa baik itu dengan cara yang diatur secara konstitusi ataupun dengan kudeta. Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki. Partai politik ini berada diantara pemerintah dan masyarakat, sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini tentunya akan sangat tergantung di pihak mana partai politik berada, apakah di pihak pemerintah ataukah oposisi, tentunya hal ini akan mempengaruhi isi dari pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang diperjuangkan.

2.1.6 Pengendalian konflik

Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja.

Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut

sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

2.1.7 Kontrol politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Baik buruknya kebijakan tentunya sangat bisa diperdebatkan mengingat kebijakan pemerintah tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang.

Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan. Ketika suatu kebijakan telah dibuat dan diimplementasikan pun perang partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat. Ketika kebijakan itu sudah menjadi keputusan tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang telah direncanakan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah.

Faktor pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, karena dibanyak kasus banyak kebijakan itu gagal atau kurang berhasil yang diakibatkan oleh pelaku atau oknum yang mengejar kepentingan pribadinya.

3. Peran Partai politik

3.1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) “peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soerjono Soekanto 1987: 220).

3.2. Peta Permasalahan Peran Partai Politik

3.2.1 Peran Sebagai Wadah Penyalur Aspirasi Politik

Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan

bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat.

Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan disekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi Negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara-negara boneka yang bernuansa kedaerahan. Negara-negara boneka ini sengaja diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Namun kenapa hal itu terjadi dan ditangkap oleh sebagian rakyat pada waktu itu? Jawabannya adalah bahwa aspirasi rakyat berbelok arah mengikuti aspirasi penjajah, karena tersumbatnya saluran aspirasi yang disebabkan kapasitas sistem politik belum cukup memadai untuk mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang. Di sini boleh dikatakan bahwa rendahnya kapasitas sistem politik, lebih disebabkan oleh karena sistem politik masih berada pada tahap awal perkembangannya.

Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde Lama, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental,

demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dicoba ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup banyak di tata menjadi 3 kekuatan sosial politik yang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta 1 Golkar. Namun penataan partai politik tersebut ternyata tidak membuat semakin berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud. Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan orde baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok tertentu.

Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan dan kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politik bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan asesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur betul-betul terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tak berfungsi.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun

1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan. Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan kepentingan politik sesaat.

Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

3.2.2 Peran sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai

perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet.

Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang public sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Gaffar, Afan, 1999).

Pertama, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah, atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Demikian juga keputusan tentang siapa yang menjadi pilihan jodoh si anak. Akibatnya anak akan tetap bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki dunia kerja (Gaffar, Afan, 1999).

Hal ini berbeda sekali di barat. Di sana anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal tertentu. Di sana, semakin bertambah umur anak, akan semakin sedikit bergantung kepada orang tuanya. Sementara itu di Indonesia sering tidak ada hubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat ketergantungan kepada orangtua, kecuali anak sudah menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.

Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Dikalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting(Gaffar, Afan, 1999).

Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah.

Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa. Yaitu mereka harus mengikuti sejak memasuki SLTP, kemudian ketika memasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. Proses pendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit lebih terbuka dan individu-individu dapat lebih leluasa untuk

menentukan pilihannya menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya.

3.2.3 Peran sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis (Bijah, Subianto, 2000)

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga Negara(Bijah, Subianto, 2000).

Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan,dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan

dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. (Bijah, Subianto, 2000).

Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih intens hanya pada saat menjelang adanya *event-event* politik; seperti kongres partai, pemilihan umum, dan sidang MPR. Peran rekrutmen politik masih lebih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik. Pada era reformasi seperti sekarang, sesungguhnya peran partai politik masih sangat terbatas pada penempatan kader-kader politik pada jabatan-jabatan politik tertentu. Itupun masih belum mencerminkan kesungguhannya dalam merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak (Bijah, Subianto, 2000).

Banyak terjadi fenomena yang cukup ganjil, dimana anggota DPRD di beberapa daerah tidak menjagokan kadernya, tetapi justru memilih kader lain yang belum dikenal dan belum tahu kualitas profesionalismenya, kualitas pribadinya, serta komitmennya terhadap nasib rakyat yang diwakilinya. Proses untuk memenangkan seorang calon pejabat politik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak dan bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai, tetapi masih lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih bersifat pribadi atau kelompok. Meskipun tidak semua daerah mengalami hal semacam ini, namun fenomena buruk yang terjadi di era reformasi sangat

memprihatinkan. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja pembinaan, penyiapan, dan seleksi kader-kader politik sangat boleh jadi tidak berjalan secara memadai.

3.2.4 Peran sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam hal ini yang dimaksud dengan konflik atau pertentangan mengandung suatu pengertian tingkah laku yang lebih luas dari apa yang biasanya dibayangkan oleh kebanyakan orang.

Secara umum kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras. Namun sesungguhnya, dasar dari konflik adalah berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu: (1) Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik; (2) Unit-unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan; dan (3) Terjadi atau terdapat interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik (Bijah, Subianto, 2000)

Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama atau identik dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan/ atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat. Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma di mana kelompok tersebut berada.

Demikian pula konflik dan bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan

sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.

Dengan munculnya partai-partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lamapun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisi pasipolitik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat luas, batasan terhadap akses informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik dan/ atau elitpolitik tertentu. Belum cukup marak tuntutan dan suara-suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

4 Definisi Kesadaran Politik

Menurut Surbakti (2007: 144), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Sementara Milbiath (2001 : 143) mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikembangkan pengertian bahwa kesadaran politik merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mencakup wawasan/ pengetahuan politik, nilai-nilai dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberikan keputusan dan menentukan pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka merubah atau mengembangkannya.

Untuk mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Ayuni Fatwa, 2013):

1. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
2. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah
3. Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik
4. Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik

4.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Politik

Kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dalam Usman Abdul Mu'is (2000:97-97) faktor yang mempengaruhi kesadaran politik adalah :

- 1) Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya/dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
- 2) Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi dimasyarakat.
- 3) Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya.
- 4) Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut mempunyai peranan dalam mempengaruhi dan menumbuhkan keasadaran politik seseorang. Faktor-faktor ini pula dapat di jadikan sebagai sebuah acuan dalam mempengaruhi kesadaran politik seseorang, sehingga seseorang bisa menjadi sadar akan politik .

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan faktualiasi penelitian ini, maka peneliti mengadakan telaah pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dengan mempertimbangkan kedekatan variabel- variabel yang digunakan. Adapun beberapa telaah pustaka yang digunakan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Bijah Subianto** dalam Penelitian yang berjudul “Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Ayuni Nur** dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati tahun 2013 di Desa Sesulu kabupaten Penajam Panser Utara”.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Elisabet Sitepu** dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter terhadap Masyarakat” Universitas Darma Agung, Medan tahun 2016.

C. Kerangka Pikir

Peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Dimana kita ketahuai bahwa kesadaran politik yang menjadi dasar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana seseorang tanggap dan mengerti situasi tentang hal yang mencakup mengenai politik, wawasan politik, orientasi politik yang memungkinkan seseorang tersebut memberikan pendapat, memberikan solusi, memberikan keputusan dan mendorong agar bergerak dalam pembangunan. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan politik dan partisipasi politik masyarakat terhadap politik.

Partai politik diharapkan mampu membangun dan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, karena menyadarkan masyarakat akan pentingnya politik beserta instrument-instrumenya adalah salah satu fungsi dari partai politik (Ramlan Surbakti : 116)

Lewat penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dari partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Bima, hingga pada akhirnya menciptakan budaya politik yang partisipatif dalam setiap kegiatan-kegiatan politik di kabupaten Bima.

Karena berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima tercatat 75,11 % dari total daftar pemilih pada pemilu legislatif 2014. Sementara pada pemilu presiden 2014, jumlah partisipasi semakin turun menjadi 71,31 %. Sedangkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 hanya sebesar 69,14 % (Kompas.com)

Secara umum penelitian ini bisa kita lihat dari bagan dibawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir (*Conseptual Framework*)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menerangkan kebenaran (Rachman, 1999: 2). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6).

Pelaksanaan penelitian kualitatif memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal, yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami (Arikunto, 2006: 12).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2018

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Moleong (2007) ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai Peran Partai Politik dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat di Kabupaten Bima.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang berkaitan dengan Peran Partai Politik Dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan yaitu tokoh-tokoh partai politik dan masyarakat mengenai peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengambil gambar terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan (Arikunto, 2006: 21-22).

1. Tahapan Pembuatan Rancangan

Tahapan ini peneliti membuat rancangan yang akan digunakan untuk meneliti di lapangan, yang mana rancangan tersebut sering disebut proposal penelitian. Di dalam penelitian tersebut dicantumkan alasan atau latar belakang dari penelitian, kerangka teoritik, dan metode yang digunakan dalam penelitian.

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer, maupun data sekunder yang mana secara garis besar data-

data tersebut diperoleh melalui penelitian di lapangan, kemudian digunakan untuk menjelaskan objek yang telah ditentukan oleh peneliti.

3. Tahapan Menyusun Laporan Penelitian

Setelah memperoleh data-data dari hasil penelitian maka prosedur selanjutnya adalah tahapan penyusunan laporan. Dalam tahap ini hasil penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan yang ditentukan agar hasilnya dapat diketahui orang lain.

F. Teknik Analisis Data

Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan/menggambarkan semua data dan informasi yang di peroleh dari literatur maupun informan di lapangan.

Sevilla, Ochave, Regal dan Uriarte (1993:61) mengatakan metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Penelitian ini pada dasarnya adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena-fenomena sosial, maka dalam penelitian ini harus ada alat yang tepat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara

2. Indikator – Indikator untuk kedua variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif.

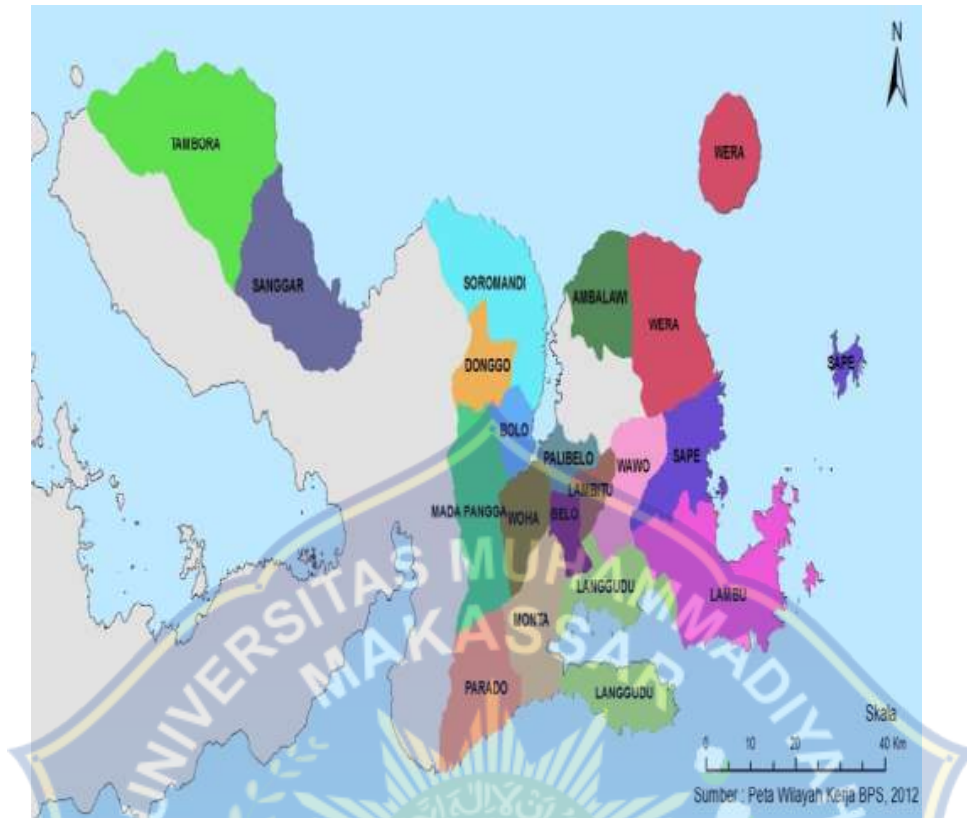
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bima terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat atau bisa disingkat menjadi NTB yang berada di pulau Sumbawa. Adapun lokasi ataupun posisi Kabupaten Bima berada pada bagian ujung timur Pulau Sumbawa. Kabupaten Bima merupakan perbatasan Provinsi NTB dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya di singkat NTT. Wilayah Kabupaten Bima sebelah utara laut Flores, sebelah timur dengan selat Sape, sebelah selatan dengan Semudera Indonesia dan sebelah barat dengan Kabupaten Dompu. Kabupaten Bima jika di lihat dari letak geografisnya antara Barat dan Timur (1180,44 - 1190,22) Bujur Timur kemudian Utara dan Selatan (080,08 - 080,57) Lintang selatan.

Kabupaten Bima merupakan Kabupaten terluar dari Provinsi NTB dan terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Wilayah Kabupaten Bima secara garis besar terdiri dari daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Adapun dataran tinggi dari wilayah Kabupaten Bima merupakan pegunungan sedangkan daerah dataran rendah merupakan pesisir pantai. Peta wilayah Kabupaten Bima dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :



B. Deskripsi Informan Penelitian

1. Informan I

Informan pertama bernama Irawan, ST, beralamat di RT 02 RW 03 desa Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Informan sekarang menjabat sebagai ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN). Informan adalah calon legislatif DPRD kabupaten Bima tahun 2019.

2. Informan II

Informan kedua bernama Sirajudin, S.IP. beralamat di Dusun Puntimoro kecamatan sanggar Kabupaten Bima. Informan sekarang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), bergabung di menjadi anggota partai politik sejak januari 2017. Informan adalah calon legislatif DPRD kabupaten Bima pemilu 2019.

3. Informan ketiga

Informan ketiga bernama Muhammad Erwin, beralamat di desa boro kecamatan Sanggar kabupaten Bima. Informan merupakan kader sekaligus calon Legislatif dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk DPRD kabupaten Bima tahun 2019.

4. Informan keempat

Informan keempat bernama Ikhsan Abdul Kahir, S.Sos. beralamat di desa Kore kecamatan Sanggar kabupaten Bima. Informan merupakan anggota dan pengurus partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jabatan sebagai Pimpinan KCM Sanggar (PK). Informan keempat juga merupakan calon legislator DPRD Kabupaten Bima tahun 2019.

D. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil salah satu tempat penelitian di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan judul skripsi “Peran Partai Politik dalam Menumbuhkan Kesadaran Politik Masyarakat di Kabupaten Bima”

Untuk memperoleh data, penulis melakukan observasi, wawancara tertutup dan dokumentasi. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk angka. Informasi yang diberikan responden menggambarkan adanya tentang peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima.

Pengolahan dan analisis data pada BAB IV ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ditulis pada BAB I yaitu :

1. Bagaimanakah peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima?

2. Apa hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten bima?

Partai politik adalah sebagai organisasi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan, yang terdiri atas para pelaku politik aktif dalam masyarakat. Salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat berperan penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik.

Untuk memudahkan analisa hasil data penelitian tersebut, maka selanjutnya penulis menggunakan analisa kualitatif yang merupakan proses merubah data instrumen pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Keadaan Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bima, dapat dilihat data tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, 2009, 2014 beserta Pilkada 2006 dan 2011 sebagai berikut:

Pileg 2004	Pilpres (P1) 2004	Pilpres (P2) 2004	Pilkada 2006	Pileg 2009	Pilpres 2009	Pilkada 2011	Pileg 2014	Pilpres 2014
87.04%	85.41%	82.96%	75.66%	73.37%	73.46%	69.70%	75.11%	71.31%

Gambar 2. Persentase Partisipasi Pemilih Pemilu di Kabupaten Bima (KPU Kabupaten Bima, 2018)

Tabel partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima pada pemilihan presiden tahun 2014

N O	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR	PENGGUNA HAK PILIH
----------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

		L	P	L+P	
1	ASAKOTA	10.580	11.022	21.602	14.555
2	MPUNDA	10.226	11.125	21.351	15.567
3	RABA	12.714	13.865	26.579	20.015
4	RASANA BARAT	11.119	11.428	22.547	15.569
5	RASANA TIMUR	5.993	6.278	12.271	8.705
TOTAL		50.632	53.718	104.350	74.411

Gambar 3. Tabel partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bima (KPU kabupaten Bima, 2018)

Dari data yang diperoleh penulis dari KPU kabupaten Bima pada gambar 2. Tabel *persentase partisipasi pemilih pemilu di kabupaten Bima* dapat di jelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bima mengalami penurunan, mulai dari pemilihan legislatif tahun 2004 tercatat tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 87,04 % dari total jumlah daftar pemilih, kemudian pada pilpres 2004 turun menjadi 85 %, pada pilkada 2006 sebesar 75,66% dan pada pemilihan legislatif tahun 2009 menurun yaitu 73,37 % kemudian pada pemilihan presiden tahun 2009 turun menjadi 73.46 %, pada pemilihan kepala daerah tahun 2011 sebesar 69,70%, kemudian pada pemilihan legislatif tahun 2014 tercatat partisipasi masyarakat sebesar 75,11 %, terakhir pada pemilihan presiden tahun 2014 partisipasi masyarakat turun pada angka 71,31%.

Pada tabel partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bima pada pemilihan 2014 (gambar 3. Tabel partisipasi politik masyarakat kabupaten Bima) dapat penulis analisis sebagai berikut:

Kecamatan asakota, jumlah pemilih terdaftar di KPU yaitu sebanyak 21.602 jiwa dengan rincian sebanyak 10.580 orang pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 11.022 orang berjenis kelamin perempuan, namun yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 14.555 orang.

Kecamatan mpunda, jumlah pemilih yang terdaftar di KPU sebanyak 21.351 orang dengan perincian 10.226 orang pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 11.125 pemilih yang berjenis kelamin perempuan, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.567 orang.

Kecamatan raba, jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 26.579 orang dengan rincian sebanyak 12.714 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 13.865 pemilih berjenis kelamin perempuan, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 20.015 orang.

Kecamatan rasanae barat, jumlah pemilih yang terdaftar di KPU sebanyak 22.547 orang dengan perincian 11.119 orang pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 11.428 orang pemilih berjenis kelamin perempuan, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.569 orang.

Kecamatan rasanae timur, tercatat pemilih yang terdaftar di KPU sebanyak 12.271 orang dengan perincian sebanyak 5.993 orang pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 6.278 orang pemilih berjenis kelamin perempuan, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 8.705 orang.

Dari data yang dianalisis diatas dapat dikatakan bahwa peran partai politik masyarakat di kabupaten Bima menurun, hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti kepada empat orang informan dari empat partai politik di lapangan

Dari hasil wawancara dari beberapa pengurus partai politik di kabupaten Bima dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Irawan, ST pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa partisipasi masyarakat di Kabupten Bima secara umum masih kurang, karena masih adanya pemikiran bahawa kontestasi seperti ini adalah sebagai perebutan kepentingan individu atau kelompok.
- b. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Sirajudin, S.IP pengurus partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima masih rendah dikarenakan pandangan masyarakat terhadap kontestasi politik lebih pada sisi ketergantungan pada nilai kefiguran, dan syarat akan kepentingan tokoh perongan atau kelompok tertentu.
- c. Kemudian menurut Muhammad Erwin, S.IP dari Partai Persatuan Pembangan (PPP), bahwa partisipasi poliik masyarakat di Kabupaten Bima masih bersifat pasif dalam artian mereka sudah paham politi, namun masih kurang untuk terlibat secara langsung dalam kontestasi politik, dikarenakan pergantian kepemimpinan dalam partai politik tidak terlalu memberikan konrtibusi dalam perubahan taraf hidup mereka.
- d. Menurut Bapak Iksan Abdul Kahir, S.Sos dari pengurus partai GOLKAR (Golongan Karya), bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima masih kurang, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap kepribadian figur-figur politik kurang baik dikarenakan banyak figur politik yang terjerat kasus-kasus seperti korupsi.

1. Peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima

Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa;

“Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa anggota pengurus partai politik di kabupaten Bima dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut Bapak Irawan, ST pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa secara konstitusi partai mempunyai misi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam konteks kesadaran masyarakat dalam berpolitik, bahwa partai politik senantiasa menumbuhkan pemahaman masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah nasib masyarakat kedepan dengan menggunakan hak politiknya secara bijak.
- b. Menurut Bapak Sirajudin, S.IP pengurus partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), bahwa peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Bima adalah dengan melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat dan bekerjasama untuk menumbuhkan nilai-nilai konsolidasi dalam kehidupan masyarakat banyak, sekaligus memberikan pemahaman bahwa politik adalah organisasi perpanjangan tangan dari rakyat kepada pemerintah dalam menyuarakan aspirasi-aspirasinya.
- c. Menurut bapak Muh. Erwin, S.IP pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahwa peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di

Kabupaten Bima selain memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, juga dengan upaya merekrut kader-kader partai yang sekiranya dapat dipercaya publik untuk membawa mandat politik, karena dengan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik yang bisa menjalankan amanat politik membuat masyarakat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

- d. Menurut Iksan Abdul Kahir, S.Sos pengurus partai Golongan Karya (Golkar), bahwa peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Bima yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan sosialisasi politik kepada masyarakat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya politik dalam kehidupan masyarakat di negara demokrasi ini.

Menurut hasil wawancara dari keempat informan di atas terdapat keasamaan jawaban yang diperoleh peneliti terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima yaitu lebih ditekankan kepada pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya politik dalam penentuan kehidupan masyarakat sehari-hari, dan hal itu sesuai dengan data amanat undang-undang yang tertuang dalam pasal 11 undang-undang nomor tahun 2008 ayat 1.

2. Hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima

Menurut KPU kabupaten Bima, hambatan yang dialami dalam upaya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima dikarenakan oleh berbagai faktor, yakni:

Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh masyarakat sehingga menghalanginya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Seperti pada hari pemilihan umum pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi. Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari sehingga menghalanginya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap politik.

Ketiga faktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan politik seperti pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa responden dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menurut Bapak Irawan, ST pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa faktor penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima yakni masih adanya konsep pengkotakkan yang diterapkan oleh politisi-politisi atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga masyarakat terkesan menganggap bahwa berbicara politik hanya berbicara kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.
- b. Menurut Bapak Sirajudin, S.IP pengurus partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), bahwa faktor penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima, yakni kurangnya pendidikan politik yang baik dalam kehidupan masyarakat, kurangnya pendekatan antara aktor-aktor politik dan masyarakat, dan benturan kehidupan sosial diantara masyarakat.
- c. Menurut bapak Muh. Erwin, S.IP pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahwa faktor penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima, yakni tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, serta rendahnya kepercayaan masyarakat publik terhadap partai politik
- d. Menurut Iksan Abdul Kahir, S.Sos pengurus partai Golongan Karya (Golkar), bahwa faktor penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima, selain karena tingkat pendidikan yang rendah juga karena ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik.

Data hasil wawancara dari keempat informan menunjukkan berbagai hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten bima, dari informan pertama berpendapat bahwa akibat adanya konsep pengkotan yang sering ditampilkan oleh politisi-politisi sehingga membuat masyarakat menginterpretasikan politik sebagai wadah dan usaha dari kelompok-kelompok tertentu dalam menggapai kepentingan masing-masing. Informan kedua, ketiga dan keempat justru menyoroti lemahnya pendidikan ditengah-tengah masyarakat di kabupaten bima menjadi penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten bima, dan adanya rasa ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Hal itu berkaitan dengan pendapat KPU kabupaten Bima yang menyatakan salah satu faktor penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yaitu faktor politis yakni ketidakpercayaan atau ketidaksukaan masyarakat terhadap partai politik dan aktor politik tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap keempat responden mulai dari partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima, juga peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik, hingga hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima bahwa kesadaran politik masyarakat masih rendah dikarenakan pandangan masyarakat terhadap kontestasi politik sebagai ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan individu atau kelompok tertentu serta tidak terlalu memberikan kontribusi untuk kehidupan masyarakat.

Sementara dalam peran partai politik untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang pentingnya politik dalam kehidupan demokrasi.

Selain itu, partai politik merekrut kader yang dipercaya publik untuk membawa mandat politik dan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat diantaranya, kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh partai politik misalnya sosialisasi yang dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya masyarakat untuk terlibat dalam politik.

E. Pembahasan

Partai politik mempunyai peran dalam pelaksanaan pendidikan politik dan berkewajiban dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana UU No. 2 tahun 2011 dalam pasal 31 ayat 1 bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemilihan kepala pemerintahan. Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi harus dapat mendorong seluruh penduduknya untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Proses pemberian suara dalam pemilihan

umum ini sebenarnya adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat. Terdapat begitu banyak aktivitas yang sebenarnya menggambarkan partisipasi politik dan salah satu yang terpenting adalah memberikan pilihan dalam pemilihan umum.

Penelitian mengenai partisipasi politik melibatkan empat orang dari perwakilan partai politik, diantaranya dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar (Golongan Karya). Data mengenai partisipasi politik masyarakat dibutuhkan oleh peneliti untuk memberikan gambaran partisipasi politik. Untuk dapat mengetahui partisipasi politik masyarakat, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk merekam respon terkait partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima tergolong rendah, dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan cenderung memiliki pandangan bahwa kegiatan politik adalah ajang untuk memperjuangkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat saja disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah terjadinya teralienasi atau terasing secara politik. Teralienasi yaitu tersaring dari kehidupan perpolitikan yang mengakibatkan seseorang menjadi apati politik atau acuh tak acuh. Ada dua indikator yang menjelaskan pola partisipasi politik. Pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik tempat tinggalnya. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah pemerintah dan sistem tersebut dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

1. Peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima

Peran partai politik menjadi hal penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, partai politik mempunyai tanggung jawab konstitusi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bima yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih rendah. Sebenarnya partai politik juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pemahaman masyarakat terhadap kesadaran politik, supaya masyarakat tidak lagi menganggap bahwa politik itu kotor dan tidak baik untuk diintervensi oleh masyarakat padahal peran partai politik bertujuan supaya masyarakat melek politik. Dan betul adanya bahwa manusia adalah makhluk politik artinya yang hidup berdampingan dan saling berhubungan. Pada hakikatnya partai politik dengan masyarakat sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, untuk itu partai politik tanpa masyarakat sakit, dan masyarakat tanpa partai politik akan cacat seperti itulah analogis sederhananya

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima, yakni dengan memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta melakukan sosialisasi baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat tentang pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan untuk memperbaiki citra politik pada masyarakat, partai politik berupaya merekrut kader-kader partai yang dianggap bisa dan mampu mengemban amanah-amanah politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, partai politik sering menjumpai banyak kendala dan hambatan, karena seringkali kehadiran politik dan partai politik ditengah-tengah masyarakat pedesaan masih dianggap sesuatu hal yang tabu. Hambatan yang dirasakan partai politik dalam upaya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat cukup bervariasi mulai dari keengganan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik seperti pendidikan politik dan sosialisasi politik karena dianggap menyita waktu produktif mereka dalam melakukan aktifitas kesehariannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima yakni tingkat pendidikan masyarakat yang rendah membuat masyarakat tidak mau untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik, misalnya sosialisasi politik dan pendidikan politik yang diadakan oleh partai politik tertentu, kegiatan-kegiatan semacam itu mereka memandangnya sebagai upaya dari oknum atau kelompok tertentu untuk mengkampanyekan partai mereka dalam rangka menarik hati masyarakat untuk memilihnya dalam kontestasi politik seperti pemilu. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang diberitakan oleh media yang menjerat anggota-anggota partai tertentu yang menjabat di lembaga-lembaga pemerintahan ikut memberikan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada politik dan partai politik, sehingga

membuat mereka makin menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan politik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima masih rendah, dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap kontestasi politik masih rendah, hal itu dikarenakan kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima yakni dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melalui sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di Negara demokrasi ini. Selain itu perekrutan kader-kader partai yang dipercaya rakyat untuk mengemban amanat politik juga menjadi bagian dari upaya partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik di Kabupaten Bima.

Kendala yang dialami partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dikarenakan banyak faktor penghambat, mulai dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik, yang sering dipandang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu ketimbang kepentingan masyarakat umum.

B. Saran

1. Partai politik harus maksimal melaksanakan tugasnya sesuai amanat konstitusi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dibidang politik.
Partai politik harus Tingkatkan hubungan sosial politik kepada masyarakat.
2. Masyarakat harus melek dan partisipatif terhadap politik demi terwujudnya kehidupan sosial yang demokratis, sejahtera adil dan makmur.



DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Gaffar. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- ,1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayuni Nur Fatwa. 2013. *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara*. Skripsi.
- Bogdan & Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- , 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Maran, Raga Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakrya.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ,1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.

Subianto, Bijah. 2000. *Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat*, No. 20.

Sugyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

https://bappenas.go.id/files/2513/4986/.../bijah_20091015142354_2381_0.pdf (Diakses tanggal 30 Mei 2018, pukul 01:29)

ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/ (Diakses tanggal 30 Mei 2018, pukul 01:29)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses tanggal 30 Mei 2018, pukul 01:29)

<https://media.neliti.com/.../161218-ID-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota.pdf> (Diakses tanggal 30 Mei 2018, pukul 14:05)

INSTRUMEN WAWANCARA TERBUKA
“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT DI KABUPATEN BIMA”

NAMA :
ALAMAT :
PARTAI :
JABATAN :
SEKRETARIAT :

TABEL PERTANYAAN

No.	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan Bapak/Ibu berpartisipasi sebagai pengurus partai politik di Kabupaten Bima?	
2.	Hal apa yang mendasari daya tarik Bapak/Ibu sehingga mendedikasikan diri sebagai pengurus/anggota partai politik di Kabupaten Bima?	

3.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu selaku pengurus partai terkait bentuk partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bima?	
4.	Bagaimana bentuk peran partai politik , khususnya partai yang Bapak/Ibu pimpin dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima?	
5.	Menurut Bapak/Ibu selaku pengurus partai, faktor apa yang menjadi penghambat partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Bima?	

6.	<p>Secara personal, apa misi Bapak/Ibu selaku pengurus partai politik dalam meningkatkan target capaian partai politik di Kabupaten Bima?</p>	
7.	<p>Menurut pandangan Bapak/Ibu sebagai pengurus/anggota partai politik, barangkali hal-hal apakah yang harus dipahami oleh masyarakat pemilih dalam mengikuti kontestasi politik di era demokratis ini khususnya di Kabupaten Bima agar tidak terjebak dengan politik praktis dan politik uang?</p>	
8.	<p>Apa harapan Bapak/Ibu selaku pengurus/anggota partai politik agar dinamika politik antara partai politik dan para elit politik dapat memberikan edukasi politik yang konstruktif bagi masyarakat, terutama bagi pemilih pemula khususnya di Kabupaten Bima?</p>	

Kabupaten Bima, / /2018

Nara Sumber,

(.....)



LAMPIRAN

1. Dokumentasi Bersama informan pertama dari partai Amanat Nasional(PAN)



Keterangan: Foto bersama pengurus partai Amanat nasional (PAN) peneliti melakukan wawancara terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima

2. Lampiran dokumentasi foto informan kedua dari pengurus Partai Pesatua Pembangunan



Keterangan: Foto bersama pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika peneliti melakukan wawancara terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima

3. Dokumentasi foto bersama informan ketiga dari pengurus partai HANURA



Keterangan: Foto ketika peneliti melakukan wawancara terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima dengan salah seorang informan dari Partai HANURA.

4. Dokumentasi foto bersama informan keempat dari pengurus Partai GOLKAR



Keterangan: Foto ketika peneliti melakukan wawancara terkait peran partai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Bima dengan salah seorang informan dari Partai GOLKAR

RIWAYAT HIDUP



Heriyanto, dilahirkan Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima pada tanggal 9 Desember 1993 dari pasangan Ayahanda Kasim Sulaiman dan Ibunda Safiah. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2000 di SDN 3 Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan tamat tahun 2006, tamat SMP Negeri 1 Sanggar tahun 2009, dan tamat SMA Negeri 1 Sanggar tahun 2012. Dua tahun kemudian (2014)

Penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2019.

